

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.1, Juni 2020

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

Mimikri dalam edisi ini mengangkat tema Moderasi Beragama. Tema ini sengaja dipilih untuk menggemakan moderasi beragama lebih nyaring lagi. Sebagaimana kita pahami bersama, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkubang dengan maraknya paham-paham keagamaan yang intoleran bahkan ekstrem. Laman berbagai pemberitaan di media *online* dihiasi dengan ajaran-ajaran keagamaan yang intoleran dan penuh dengan ujaran kebencian. Dalam situasi semacam itu, maka ceramah-ceramah yang sejuk, informasi yang menenangkan dan tulisan-tulisan yang mengusung kedamaian dan moderasi beragama patut dimasifkan.

Moderasi beragama sendiri adalah sikap keberagamaan yang memilih posisi di tengah-tengah. Tidak mengambil posisi ekstrem di salah satu sisi; radikal di sisi satunya dan liberal pada sisi yang lainnya. Tentu moderasi beragama, bukanlah menggampangkan agama, misalnya karena atas nama kebebasan, lalu harus memungguni prinsip-prinsip agamanya sendiri. Sebaliknya moderasi beragama adalah sikap sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama, sembari di saat yang sama terbuka untuk berdialog dengan agama lain.

Jika sikap seperti yang disebutkan tadi yang dimaksud dengan moderasi beragama, maka seharusnya “*all religions are inherently moderate.*” Tetapi sayangnya dalam praktiknya tidak semudah mengucapkannya. Di Indonesia sendiri tantangan untuk menerapkan moderasi beragama ini tidaklah mudah. Kendati demikian, berbagai pengalaman-pengalaman dan praktik yang berkembang di masyarakat memberikan harapan yang cukup besar. Harapan bahwa moderasi beragama akan menjadi *mainstream* beragama di Indonesia.

Beberapa tulisan dalam mimikri kali ini menggambarkan beberapa model-model moderasi beragama yang dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski di antara itu ada pula yang memperlihatkan tantangan moderasi itu sendiri. Salah satunya yang memperlihatkan tantangan atas moderasi beragama, tepatnya moderasi Islam termuat dalam tulisan pertama yang disajikan oleh Muhammad Nurkhoiron: “*Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam Dalam Masyarakat Pasca Sekuler.*” Tulisan ini mempertanyakan kemajuan Islam moderat saat ini di tengah gemuruhnya Islam politik yang sedang semangat mencari celah penyatuan agama dan negara.

Sementara itu tulisan Sabara yang menyoal Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan menunjukkan kerentanan dari keragaman di Indonesia pasca reformasi. Dengan penelusuran literatur, Sabara mengemukakan keretakan-keretakan dalam kemajemukan kita karena semakin menguatnya politik identitas pasca reformasi. Karena itulah menurutnya, moderasi beragama menjadi alternatif keberagamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang religius-nasionalis ini.

Tulisan selanjutnya dari Syamsurijal mengenai *Santri yang Berdamai dengan Tradisi Lokal*, menyajikan satu fakta yang cukup unik, yakni kenyataan bahwa pesantren *salafi* yang selama ini dituduh konservatif, intoleran dan anti tradisi, malah berjalan sebaliknya di pesantren-pesantren *salafi* di Polewali Mandar (Polman). Melalui kiai atau *Annang Guru*, pesantren *salafi* justru menjadi penjaga tradisi atau tepatnya menjadi semacam *the main connecting link* antara Islam dan tradisi lokal.

Berikutnya ada tulisan Sitti Arafah: *Pengarustamaan Kearifan Lokal dalam Moderasi Beragama; Meneguhkan Kepelbagaian*. Tulisan ini menitik beratkan pentingnya tradisi atau kearifan lokal yang ada di banyak tempat di Indoensia ini dalam menopang kehidupan beragama yang moderat. Kearifan lokal yang bersumber dari ajaran leluhur sejatinya banyak mengandung ajaran tentang moderasi ini. Tinggal kini bagaimana ajaran tersebut kembali direvitalisasi agar tidak kehilangan elang vitalnya dalam kehidupan beragama masyarakat.

Setelah tulisan Siti Arafah, Muh Rais muncul dengan tulisan yang lebih konseptual. Ia menjelaskan konsep moderasi Islam yang disebut dengan *washatiyah*. Tulisan berjudul “*Mengarus Utamakan WasathiyahIslam: Antara Doktrin dan Praksis Sosial*”, berkuat dengan bagaimana Islam memandang *wasatiyah* berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif, misalnya pandangan Al-qur’an, Hadist maupun pendapat ulama. Kendati tulisan semacam ini telah banyak ditulis oleh berbagai pakar, tetapi tetap terasa penting, khususnya untuk kepentingan sosialisasi secara masif isu moderasi Islam.

Tulisan yang juga mengemukakan pengalaman moderasi beragama muncul dalam: “*Warung Kopi Jalan Roda; Merekam Ingatan Kolektif dan Merawat Toleransi*”. Tulisan Irfan Syuhudi menunjukkan Warung Kopi bisa menjadi ruang publik tempat perjumpaan berbagai kalangan. Warung Kopi di Jalan Roda di kota Manado telah menjadi ruang semacam itu. Di tempat itulah toleransi disemai dalam bentuk-bentuk diskusi dan dialog-dialog yang konstruktif.

Mimikri untuk edisi kali ini ditutup oleh Paisal yang menulis soal “*Kerukunan Beragama dan Dinamika kebangsaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua*.” Tulisannya menunjukkan bahwa masyarakat Papua di daerah perbatasan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan beragama. Tetapi yang lebih menarik, meski mereka sudah sering melintas batas dan berbaur dengan masyarakat Papua Nugini, tetapi Komitmen Kebangsaannya tidak hilang.

Walhasil, apakah setuju dengan ide-ide yang tercetus dalam tulisan ini atau tidak, itu semua terpulang ke pembaca sekalian untuk menyelami tulisan-tulisan dalam jurnal ini. Pada akhirnya redaksi mengucapkan: “Selamat membaca....!”

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

DAFTAR ISI

____ **MUHAMMAD NURKHOIRON** ____

LIBERALISASI SEBAGAI MODERASI ISLAM
DALAM MASYARAKAT PASKA SEKULER

Halaman 1 - 16

____ **SABARA** ____

PARADIGMA DAN IMPELEMENTASI MODERASI
BERAGAMA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

Halaman 17 - 35

____ **SYAMSURIJAL** ____

SANTRI YANG BERDAMAI DENGAN TRADISI LOKAL:
MELONGOK MODERASI BERAGAMA
DI LINGKUNGAN PESANTREN SALAFI

Halaman 36 - 57

____ **SITTI ARAFAH** ____

PENGARUSUTAMAAN KEARIFAN LOKAL DALAM MODERASI BERAGAMA;
MENEGUHKAN KEPELBAGAIAN
(SEBUAH PRAKTIK PADA MASYARAKAT PLURAL)

Halaman 58 - 73

____ **MUHAMMAD RAIS** ____

WASATHIYYAH ISLAM: ANTARA DOKTRIN DAN PRAKSIS SOSIAL

Halaman 74 - 95

____ **MUH. IRFAN SYUHUDI** ____

WARUNG KOPI JALAN RODA; MEREKAM INGATAN
KOLEKTIF DAN MERAWAT TOLERANSI

Halaman 96 - 112

____ **PAISAL** ____

KERUKUNAN BERAGAMA DAN KOMITMEN KEBANGSAAN
DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA

Halaman 113 - 130

LIBERALISASI SEBAGAI MODERASI ISLAM DALAM MASYARAKAT PASKA SEKULER

Muhammad Nurkhoiron

Sosiolog, Pegiat HAM, Wakil Ketua Komnas HAM (2012-2017),

Ketua Yayasan Desantara

Email:nurkhoiron1974@gmail.com

Abstrak

Moderasi Islam kini tengah menjadi isu yang cukup mengemuka di masyarakat. Selain karena Moderasi Islam dianggap menjadi alternatif dari Islam Radikal dan Islam Liberal, Moderasi Islam juga dianggap inheren dengan Islam itu sendiri. Tetapi apakah Moderasi Islam mengalami kemajuan saat ini? Tentu tidak ada jawaban pasti. Tetapi jika Islam Moderat yang dimaksudkan adalah pemisahan Negara dan Agama (Islam Sekuler) atau Islam Liberal ala Cak Nur, tampaknya kini mengalami tantangan yang hebat. Kelompok-kelompok yang masih mengidam-idamkan penyatuan agama dan negara, sama sekali tidak surut. Bahkan jika menyaksikan aksi-aksi yang terkait dengan politik elektoral, kelompok ini malah makin gegap gempita. Aksi 212, terlepas dari banyaknya kelompok kepentingan yang terlibat di dalamnya, menunjukkan wajah kelompok Islam Politik ini, semakin terang-terangan dengan agendanya. Wacana-wacana yang berkembang di media-media *online* juga menunjukkan hal itu. Tulisan ini mencoba memberi tawaran moderasi Islam di tengah situasi semacam ini, yakni dengan tidak membangun garis tegas antara Islam Moderat dengan kelompok Islam yang masih mengangan-angankan penyatuan negara dan agama. Dialog yang lebih setara perlu dibuka untuk berbagai kelompok dalam membangun apa yang kita sebut dengan Islam Moderat ini.

Kata Kunci: *liberalisasi, moderasi Islam, masyarakat, sekuler*

PENDAHULUAN

Apakah gerakan moderasi Islam saat ini mengalami kemajuan? Sulit untuk dijawab, namun problem klasik sekaligus pekerjaan rumah yang berat gerakan moderasi Islam hingga saat ini adalah mencari relasi ideal di antara agama dan negara. Karena hingga saat ini, gelombang besar gerakan Islam di Indonesia tidak sedang menuju sebagaimana yang dibayangkan kelompok liberalisasi Islam yang selesai memisahkan politik dan agama. Sebaliknya, sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia, sebagian besar

cita-cita eksponen gerakan Islam itu ialah memasukkan hukum agama/syariat ke dalam sistem ketatanegaraan. Karena bagi mereka, Islam adalah *din wa daulah*, prinsip-prinsip Islam harus diperjuangkan melalui penataan hukum, meskipun kelak harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Itulah kenapa, para pemuka dan tokoh gerakan Islam di Indonesia, sulit berpuas diri dengan berdirinya Republik Indonesia yang ditegakkan di atas konstitusi UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Karena salah satu kerikil yang tetap menyempil di dalam sepatu Republik Indonesia adalah

dihilangkannya tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945¹ yang bagi mereka adalah sangat esensial, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Penghilangan tujuh kata dari piagam Jakarta ini, bagi tokoh-tokoh gerakan Islam rupanya bukan sekedar soal kompromi politik, namun seperti telah

¹Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa tujuh kata yang dihapus itu terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal tujuh kata itu sudah disepakati di panitia sembilan dalam sidang BPU PKI yang dibentuk pada tanggal, 10 Juli 1945. Panitia sembilan ini terdiri dari Ir Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr Ahmad Subarja, KH Wahid Hasyim, Mr Mohammad Yamin, H Agus Salim, Abdoel Kahar Moezakir, AA Maramis. Abikoeso Tjokrosoejoso. Dihapusnya tujuh kata, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah hasil kompromi sekaligus jalan tengah untuk menghindari wakil-wakil dari Indonesia Timur yang merasa kalimat dalam piagam Jakarta itu bersifat diskriminatif, sekaligus ancaman jika kata-kata itu tidak dihapus akan memicu pergolakan di Indonesia timur. Beberapa tokoh Islam menganggap penghapusan tujuh kata itu tidak fair (karena sudah disetujui), dan menganggap peristiwa ini sebagai sejarah kelam yang menghambat semangat penegakan syariat Islam sebagai pelaksanaan konstitusi. Maka tidak heran, perjuangan konstitusional untuk memasukkan kembali piagam Jakarta berlanjut hingga dikeluarkannya memorandum DPRGR 1966 mengenai sumber tertib Hukum RI yang kemudian ditingkatkan menjadi keputusan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Keputusan ini menegaskan kembali Piagam Jakarta yang menjawai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi. Lihat, Mohammad Hatta (2015). Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Kompas. hlm. 310. Lihat juga MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

dijelaskan di atas, perjuangan Islam adalah perjuangan *din wa daulah*, yang dalam kata-kata Mohammad Abduh, tidak bisa dikompromikan dengan alat-alat negara sekuler, karena Islam memiliki rute sejarah yang berbeda dengan Barat. Dalam Islam, agama tidak bisa dipisahkan dengan *daulah/negara*, karena prinsip-prinsip Islam bersifat universal sehingga pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan melalui hukum publik, atau yang lebih dikena

Sebagai syariat Islam. Oleh karena itu, seperti Abduh, membentuk peradaban Islam tak bisa dicapai dengan mengikuti cara-cara Barat yang sekuler: Memisahkan antara agama dengan politik, memisahkan doktrin *keagamaan* dengan kerja kemanusiaan

Pertentangan yang tak pernah usai di antara Islam dan Barat terus mewarnai perdebatan akademik, politik dan pegiat kebudayaan. Moderasi di kalangan Islam, bagaimana doktrin-doktrin keagamaan dapat disandingkan dengan capaian modernitas Barat masih terus digali dengan beragam perspektif. Mungkin ini pekerjaan rumah paling sulit. Kesulitan itu pertama-tama bukan saja melihat fakta kian menguatnya gerakan politik Islam, akan tetapi juga gagasan mendamaikan antara Islam dan modernitas – yang kerap dituduh sebagai pem-barat-an, tak pernah

terumuskan dalam bingkai yang lebih implementatif. Cak Nur (Nurcholish Madjid) dengan gerakan sekularisasi melalui jargon, *Islam Yes, Partai Islam No*, yang dikenalkan tahun 1970an, adalah satu dari berbagai corak moderasi Islam yang dikenalkan di Indonesia. Gagasan Cak Nur sendiri kerap disederhanakan dengan Islam liberal, yang akhir-akhir ini kiprahnya semakin menyusut.

Beragam kendala yang dihadapi pembaruan Islam yang hendak meneruskan sejarah sekularisasi justru berbalikan dengan fakta semakin menguatnya gerakan Islam. Ia bergerak, seperti dikatakan Chantal Mouffe, dalam dua aras sekaligus; politik dan politikal (Mouffe, 2014;182). Ia bergerak bukan saja untuk menegakkan syariat Islam melalui jalan politik, namun juga bergerak dalam beragam bentuk antagonisme/perlawanan di berbagai relasi sosial yang berbeda-beda; berteriak keras melalui ceramah, pengajian di sosial media, pengajian rutin di masjid-masjid, institusi publik, perusahaan, dan seterusnya. Tak pelak, beberapa sumber mencatat, media sosial yang menjangkau sekitar 150 juta populasi Indonesia, selama beberapa tahun dipenuhi dengan konten dakwah Islam pro syariat Islam. Fenomena maraknya pengajian di *medsos* ini tampaknya jauh dari apa yang dibayangkan Cak Nur sebagai model dari

liberalisasi ajaran-ajaran Islam (Madjid, 1987-17; 3-12).

Di kalangan pendukung sekularisasi, termasuk Cak Nur, fenomena ini barangkali tak terbayangkan sebelumnya. Di tengah deru modernisasi/perubahan sosial ekonomi, peran agama yang dibayangkan kaum sekuler tergerus dari ruang publik masuk ke dalam ruang privat (Berger, 1990 [1967], Luckman, 2000 [1960]) ternyata menunjukkan fenomena sebaliknya: Beragam ekspresi dan artikulasi keagamaan justru timbul dimana-mana. Apa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini semakin menyangsikan keyakinan teori sekularisasi yang mendesak agama ke ruang personal akibat rasionalisasi dunia kehidupan. Ledakan paling brutal dari berbagai ekspresi keagamaan adalah helatan politik Pilpres 2014, diteruskan ke dalam pentas persaingan Pilkada DKI 2017, kemudian berlanjut kembali ke persaingan dalam panggung Pilpres 2019 yang sisanya masih berlanjut hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa ini mengisyaratkan belum mudarnya gerakan islamisme di Indonesia sekaligus peringatan keras betapa upaya memisahkan agama dan politik (sekularisasi) (negara) adalah sia-sia.

Sebenarnya menjadi anomali bagi gerakan islamis yang menguat dalam

persaingan politik di helatan pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Karena kedua kandidat, baik Jokowi maupun Prabowo bukan berasal dari keluarga santri dan berlatar belakang aktivis gerakan keagamaan, melainkan keduanya berasal dari tradisi abangan (Jawa). Berdasarkan tipologi antropologis Clifford Geertz, abangan digambarkan sebagai rival kaum santri, baik dalam mengembangkan tradisi-tradisi keagamaan maupun preferensi politik (Geertz, 1983 [1960]). Mengapa kubu Prabowo secara efektif dapat menarik kalangan islamis, baik dari *revivalis* maupun kelompok ekstrem, sementara Jokowi sebaliknya, bisa menarik sebagian besar gerbong golongan moderat Islam-oleh karena itu menjadi daya tarik bagi kelompok minoritas, bisa menjadi kajian tersendiri. Yang menarik dari helatan politik ini adalah betapa kuatnya narasi keagamaan diproduksi dan direproduksi oleh kedua kubu.

Media tentu saja mengambil peran penting dalam kontestasi kedua belah pihak. Analisa sosiologis media membantu menjelaskan bagaimana proses produksi, reproduksi sekaligus konsumsi khalayak di dalam lalu lintas media sosial atas isu-isu ini tak lagi menggunakan kerangka moral dalam membangun opini. Berbagai konten yang disebar dalam rangka membangun kampanye politik telah memasuki era yang disebut sebagai paska kebenaran (post

truth). Berbagai strategi dilakukan, sebagaimana digambarkan Vittorio Bufacchi, untuk membentuk lingkungan dimana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Yang terjadi adalah delegitimasi atas kebenaran ilmiah (Bufacchi, 2000). Mereka mengikuti hukum pasar, menarik konstituen sebanyak-banyaknya dalam rangka memenangkan pertarungan. Kebenaran bukan menjadi kerangka dalam menciptakan konten, melainkan upaya memperbanyak konten yang disebar dengan berbagai cara dengan sendirinya akan menciptakan “kebenaran baru”. Seperti dalam teori hegemoni Gramsci, penerimaan seseorang atas suatu ide tidak didasarkan oleh dominasi daya paksa, melainkan dengan terus menerus mereproduksi pengetahuan hingga seseorang secara sukarela mengikutinya.

Dari berbagai konten yang ditujukan menarik sebanyak-banyaknya konstituen, tampaknya wacana keagamaan menjadi magnet paling mengesankan. Opini, informasi dan berbagai pengetahuan terkait kedua kandidat, menjadi daya tarik yang menimbulkan pro-kontra yang *trending* topik di media tak ayal berkaitan dengan narasi-narasi keagamaan. Misalnya, Jokowi dinarasikan sebagai sosok anti-Islam, dikelilingi oleh orang-orang kafir, Cina, dan tidak sedikit yang membangun narasi Jokowi sebagai anak

dari seorang tokoh PKI. Sebaliknya, narasi Prabowo juga dihubungkan dengan sikap keagamaannya: tidak pernah salat, ibunya dari keluarga Kristen, hingga ketidakharmonisan keluarga yang berujung perceraian yang dikaitkan dengan problem moralitas (agama) seorang calon pemimpin. Dapat dibayangkan jika *cuitan* kedua kubu selalu menjadi isu panas, bertendensi saling menjatuhkan satu sama lain, memuat kata-kata destruktif, *bullying* dan seterusnya. Kecebong versus Kampret adalah gambaran para pendukung Jokowi vs Prabowo dimana kedua kelompok itu saling berbalas umpatan dengan kata-kata destruktif: “kaum bumi datar”, *cebonger*, *bani taplak*”, dll.

Persaingan dalam merebut wacana keagamaan (Islam) terus berlanjut ke persaingan politik pilkada DKI 2017; Ahok vs Anies Baswedan. Digambarkan oleh Merlyna Liem betapa kedua kubu tidak bisa menahan diri melakukan serangan secara membabi buta. Dalam bahasa Liem, keduanya sama-sama mereproduksi hoax (opini/berita yang tidak didasarkan pada fakta obyektif), mengerahkan *buzzer* berbayar untuk memojokkan lawan politik. Meskipun kedua kubu sama-sama beropini bahwa mereka akan menggunakan kampanye positif namun dalam praktiknya menggunakan berbagai cara (Merlyna Lim, 2017). Kubu Anies Baswedan kerap

digambarkan sebagai kaum bumi datar, *kadrun* (kadal gurun), kaum berjanggut, untuk menggambarkan golongan islamis yang dianggap konservatif, berpikiran tertutup ke-arab-arab-an alias Islam yang tidak kontekstual, dan dianggap anti pluralis. Sementara kelompok Ahok dipojokkan sebagai golongan kafir, pro-Cina, pro-Yahudi, dan seterusnya.

Tampaknya dalam perhelatan politik yang penuh persaingan antara kubu yang saling berhadapan, belum pernah lagi dijumpai suatu bentuk mobilisasi politik besar-besaran, demonstrasi massal yang melibatkan ribuan massa, kecuali perhelatan politik Pilkada DKI 2017. Mobilisasi politik ini melibatkan hampir semua kelompok garis keras seperti FPI, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yang kerap menyerukan penegakan syariat Islam. Sebagian ahli politik melihat ini sebagai persaingan politik paling tragis karena mengomodifikasi agama sedemikian rupa demi memenangkan pertarungan. Namun fenomena yang tak bisa dikesampingkan dari aksi massa ini adalah munculnya berbagai kelompok di dalam gelombang lautan massa di sekitar monumen nasional (monas) yang sebelumnya tak pernah berhubungan dengan isu politik; Santri-santriwati yang berbondong-bondong dari berbagai daerah, kaum pekerja/buruh muslim dari berbagai perusahaan, kelas menengah muslim perkotaan yang tidak

sedikit di antara mereka telah mengenyam pendidikan dari luar negeri dan bekerja di perusahaan multinasional.

Gelombang aksi massa yang menurut berbagai sumber dihadiri oleh jutaan orang ini memenuhi jalan-jalan Sudirman hingga bundaran monumen nasional (Monas), disambut dengan beragam reaksi; simpati, pujian, solidaritas, hingga kecurigaan. Gelombang lautan manusia ini memang tidak cukup sekedar dilihat dalam kaca mata kepentingan politik elektoral, meskipun aroma aksi anti Ahok sangat terasa. Lautan massa/umat ini menunjukkan pertautan antara ekspresi keagamaan yang menjadi bagian dari budaya urban sehari-hari dan bentuk mobilisasi politik. Berkumpulnya lautan massa/umat ini dapat dimaknai kemunculannya sebagai dorongan keagamaan sekaligus pada saat bersamaan adalah dorongan politik yang secara bersama-sama merayakan apa yang disebut politik identitas. Percampuran antara irasionalitas: kecemasan, ketakutan, kerinduan dan rasionalitas bertujuan. Secara antropologis, situasi ini tergambar dari laporan beberapa orang yang hadir di tengah lautan massa ini:

Dr Iswandi Syahputra;

Demi Allah... baru kali ini saya melihat aksi demo hingga menangis. Saya tidak kuat menahan rasa haru, bahagian,

bangga, gembira, dan sedikit amarah semua berbaur menjadi satu ..

Tepat di depan Kedubes AS, dada saya meledak menangis, haru saat seorang kakek renta menawarkan saya buah salak, gratis. Saya tanya, "Ini salak dari mana Kek?", "Saya beli sendiri dari tabungan, jawabnya. Saya hanya terdiam dan terpaku menatapnya (kabarkota.com/ 4/12/2016).

Kisah wartawati yang ditulis ulang wartawan bagkapos.com; Melihat lautan massa yang bersolawat dan menyerukan takbir, dia mengaku bulu kuduknya merinding melihat kemegahan persatuan umat Islam. Rasa takut pun hilang, karena mereka yang mengagung-agungkan kebesaran Tuhannya pasti tidak akan sanggup menyakiti manusia lain, tulisnya (bangkapos.com, 4/12/2016).

Seberapa pun beragamnya latar belakang dan kepentingan orang-orang yang hadir di dalam lautan aksi massa ini, tak diragukan lagi bahwa mobilisasi kelompok Islam garis keras adalah faktor yang menentukan. Selama beberapa dekade, kekuatan politik Islam garis keras semakin meningkat khususnya dalam membangun opini publik. Sebuah survei tahun 2016 menyatakan dukungan publik terhadap gerakan keagamaan FPI meningkat menjadi 22, 6% sejak tahun 2011 yang berada di angka 16, 6%. Laporan dari kubu Jokowi sendiri, berdasarkan informasi intelijen kepolisian, terdapat sekitar 11 juta pengguna sosial

media yang menyebarkan kebencian berbasis agama², terutama dilakukan dalam rangka serangan terhadap pemerintahan Jokowi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan meningkatnya dukungan NKRI bersyariah tahun 2018 sebesar 13,2% dari 4,6% pada tahun 2005, pada saat yang sama dukungan (pro) terhadap Pancasila menurun sekitar 10%³. Dalam situasi seperti ini menjadi beralasan jika di kalangan warga negara minoritas (non muslim) mengalami kecemasan, dan hal ini menjadi dorongan kuat mereka untuk memenangkan Jokowi bersama-sama dengan kelompok Islam moderat.

Ada berbagai faktor yang mengakibatkan meningkatnya kelompok Islam garis keras. Menurut Vedy R Hadiz, ini adalah fenomena politik global paska sosialisme (*post socialist world politic*). Di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, maraknya politik identitas terkait dengan runtuhnya gerakan kiri, tiadanya gerakan politik yang terorganisir, dan bisa jadi menyangkut melemahnya politik elektoral, dimana partai-partai politik tidak

mampu merealisasikan aspirasi para pemilih mereka. Oleh karena itu, tidak ada relasi menguatnya kelompok dan jaringan Islam garis keras dengan meningkatnya suara partai politik Islam.

Jika dirunut ke belakang, semasa Orde Baru, Soeharto kerap menggunakan Islam garis keras untuk menghadapi serangan dari kelompok tentara yang tidak menyukainya. Perseteruannya yang terus meruncing ini akhirnya mendorong Soeharto memberi panggung bagi kemunculan organisasi semacam ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Aktivistik Islam, cendekiawan, akademisi, bahkan pengusaha muslim dikonsolidasikan melalui grup ini. Ini juga berkaitan dengan perubahan sosiologis meningkatnya kelas menengah muslim Indonesia yang termarginalisasi dalam proses modernisasi Orde Baru (Hefner, 1995). Dengan jitu, meluapnya gelombang perubahan ini digunakan Soeharto sebagai penyeimbang atas semakin menguatnya tentara yang bersiap diri merebut posisinya. Tak pelak lagi, gerakan-gerakan keagamaan/Islam semakin bermekaran, seiring runtuhnya Orde Baru.

Yang tak terpikirkan ketika gerakan menurunkan Soeharto dijadikan isu bersama, usai kejatuhan presiden yang memerintah lebih dari tiga puluh tahun ini, gerbong prodemokrasi, aktivis pejuang

²Laporan ini disampaikan secara informal dalam pertemuan terbatas peringatan hari HAM Internasional 10 Desember 2016 di istana Negara Jakarta.

³Survei LSI: Pro Pancasila turun 10% Pro NKRI Bersyariah Naik 9%, Detik.com, 17 Juli 2018.
<https://news.detik.com/berita/4119173/survei-lsi-pro-pancasila-turun-10-pro-nkri-bersyariah-naik-9>.

HAM harus berbalik berhadap-hadapan dengan gerakan Islam politik. Berbeda dengan kelompok prodemokrasi dan aktivis HAM, gerakan Islam politik lebih lama berjejaring di berbagai lapisan; kelas menengah, masyarakat akar rumput, tokoh agama, penceramah/dai/ustadz, dan lain-lain. Isu-isu demokrasi, hak asasi manusia kurang menyentuh ke masyarakat bawah, kecuali melalui Gus Dur (Abdurrahman Wahid), gagasan-gagasan demokrasi bersemi di kalangan kiai-kiai muda NU, tokoh-tokoh pesantren yang menjadi basis organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Dengan kata lain, isu-isu demokrasi,

pendidikan kewarganegaraan sama sekali tidak menyentuh dan mengaitkannya dengan pendidikan keagamaan. Hal ini tergambar dalam survei PPIM, Universitas Islam Negeri Jakarta (2017). Survei ini memaparkan bahwa 51,1 mahasiswa/siswa memiliki sikap intoleran terhadap kelompok minoritas (Ahmadiyah, Syiah), dan 34,3 bersikap intoleran terhadap non muslim. Survei ini juga menunjukkan pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain (48,95%)⁴.

⁴ <https://tirto.id/survei-uin-jakarta-intoleransi-tumbuh-di-banyak-sekolah-dan-kampus-czQL>.

Situs/ Judul	Topik Yang dibicarakan
Uinsgd.ac.id/ Hubungan Islam dan Negara	Relevansi implementasi Konstitusi Madinah
Ejournal.stainpamekasan.ac.id/ Islam dan Negara	Netral, bersifat pemetaan para penggagas relasi Islam dan Negara (konservatif, modernis, sekuleristik) namun bersetuju merekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik
Journalwalisongo.ac.id/ Hubungan Islam dan Negara	Pengisian ruang ruang agama dalam tatanan kehidupan kontemporer (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) (secara tidak langsung menolak bentuk negara sekuler), dan bahwa respons politik Islam Indonesia di era kontemporer harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya.
www.researchgate.net/ Islam dan Negara	Idem No 2
Jurnal.radenfatah.ac.id/ Relasi Islam dan Negara: Pemikiran Politik Islam	mendeskripsikan relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam dilihat dari al-Qur'an (Idealitas negara Islam)
Graduate.uinjkt.ac.id/ Hubungan Agama dan Negara	Tulisan Maskuri Abdullah: Menolak sekularisasi, Modernisasi Politik yang berideologi Pancasila dimana agama berfungsi integratif (mencegah perpecahan)
Ejournal.unidagontor.ac.id/ Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan...	Islam kafah, kewajiban menjalankan syariat Islam, Islam dan demokrasi tidak sepadan, Islam di atas demokrasi
www.kompasiana.com/ Hubungan antara Agama dan Negara: Studi terhadap Pemikiran	Membahas Pemikiran Hidajat Nataatmadja yang mempertemukan gagasan Islam dan falsafah Pancasila rangka membangun peradaban Islam (menolak sekularisme)
www.kompasiana.com/ Negara dalam Islam	Bersetuju dengan Darul Islam sebagai konsep yang dijalankan semasa piagam madinah
Indonesia.go.id/ Tidak Ada Negara Islam	Menolak Negara Islam

Survei ini juga menjelaskan betapa pendidikan keagamaan di Indonesia tak banyak berubah. Meskipun Cak Nur telah melontarkan pembaruan pemikiran Islam sejak tahun 1970, gagasannya tidak tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Sebaliknya, kelompok yang selama ini ditentang Cak Nur, yang

memperjuangkan gerakan politik Islam, menolak sekularisasi semakin tumbuh dimana-mana. Tidak terkecuali pengajian-pengajian, ceramah di media sosial, internet dipenuhi oleh ceramah keagamaan dari kelompok yang sering disebut Cak Nur sebagai kelompok *skripturalis*.

Berdasarkan penelusuran penulis yang menggunakan mesin pencari (*search engine*) google, dengan kata kunci Islam dan Negara ditemukan sepuluh situs teratas di google⁵. Dari sepuluh situs itu, tidak ada satu pun gagasan di laman tersebut yang mendukung negara sekuler (pemisahan tegas antara agama dan negara) sebagaimana diyakini oleh aktivis penggerak Islam moderat yang menjadi bagian dari penerus perjuangan Cak Nur.

Kata Kunci: Agama dan Negara
26/5/2020/22.30pm.

Sementara dengan melakukan penelusuran serupa yang menggunakan kata kunci dakwah Islam, dari sepuluh situs teratas yang muncul di *google*, sebagian besar merupakan situs berita/informasi dari/tentang kelompok islamis. Dari sepuluh informasi/berita yang muncul, tiga tokoh menempati urutan teratas muncul di *google*. Pertama, adalah

Dr, Zakir Naik. Ia adalah sosok terkemuka Islam garis keras yang suaranya semakin populer karena kegemarannya melakukan serangan teologis terhadap ajaran kristen. Kedua, Syafiq Riza Basalamah, keempat, Ustad Abdussomad, dan ketiga, Tifatul Sembiring. Keempat tokoh itu adalah bagian dari kelompok yang berseberangan dengan gagasan Cak Nur. Sebaliknya, tak satu pun dari sepuluh situs itu adalah bagian dari kelompok pendukung pembaruan Islam ala Cak Nur. Bahkan pengajian Maiyah Cak Nun (yang berada di urutan keempat) yang belakangan ini semakin populer di sosial media, meskipun dikenal bukan dari kelompok garis keras namun berlawanan dengan gagasan keislaman Cak Nur. Sementara para pendukung pembaruan Islam, masih berkembang di beberapa kelompok tertentu, belum banyak direproduksi dan dikonsumsi dari khalayak luas.

Kata kunci: Dakwah Islam (diunduh 27/5/2017, 00am. WIB)

Penceramah	Topik
Zakir Naik	Safari Dakwah Islam Dakwah Islam Penyejuk
Ustadz Abdussomad (UAS)	Berita tv tentang UAS
Cak Nun	Dakwah Islam di Australia
Ust. Baharudin Habibie	Dakwah yang dikembangkan di Mall

⁵ Munculnya situs-situs di peringkat paling atas berdasarkan kata kunci yang kita cari menunjukkan jumlah pengunjung dan banyaknya situs ini diunduh. Perangkingan ini tentu akan berbeda-beda tiap waktu. Jika dibandingkan dengan dua atau tiga tahun sebelumnya, tentu rangking sepuluh besar lebih didominasi lagi oleh kelompok Islam garis keras mengingat pada situasi saat ini, pengajian-pengajian online, media sosial mengalami penurunan khususnya dari kalangan kelompok garis keras yang tidak segencar sebelumnya, sejak musim pandemic covid-19. Bahkan sebaliknya, pada masa pandemic covid sejak dua bulan terakhir, hingga artikel ini ditulis di media social berkembang model pengajian-pengajian baru yang disebarkan oleh kalangan kiai, uatadz-ustadz muda dari kalangan NU dimana mereka menawarkan pengajian online dalam bentuk kajian kitab kuning.

Ust. Wijayanto	Pengetuk Hati
Ust. Syafiq Riza	Basalamah
Idem	
Ust. Abdullah Taslim	Islam Agama Yang dijaga Allah/ Aqidah Ahlusuunah Waljamaah menghadapi kelompok Islam
KH. Zainuddin MZ	Qiamat

Globalisasi Menuju Ke Kanan (?)

Tampaknya bandul politik yang bergeser ke kanan tidak saja dialami Indonesia. Ini adalah fenomena global yang dihadapi berbagai negara dari negara-negara Eropa, Amerika hingga Asia. Sebagian besar naiknya kelompok kanan Amerika, Eropa dipicu oleh krisis ekonomi yang memperuncing kesenjangan/ketimpangan ekonomi, sosial dan budaya antara penduduk setempat dengan pendatang baru/ imigran. Ketakutan, kecemasan terhadap orang asing (*xenophobia*), khususnya kaum imigran muslim menjadi komoditi politik yang semakin populer. Di USA kemenangan Donald Trump tidak lepas dari kampanye berbau rasis, *xenophobia* –khususnya Islamofobia, yang berkali-kali dia nyatakan di berbagai kesempatan. Trump berhasil menarik segmen masyarakat yang selama ini terabaikan: mayoritas kulit putih, khususnya dari kalangan menengah

bawah dimana mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terdampak cukup keras akibat krisis. Kelompok ini semakin marjinal di masa Obama, terhempas di tengah kapitalisme global; terdesak kaum imigran, diremehkan kaum urban/intelektual kosmopolit, dan geram karena sebagian upahnya dipotong untuk pajak lantaran negara menyantuni orang miskin.

Pendeknya, gerakan moderasi saat ini semakin menghadapi situasi sulit karena tak sanggup mengisi kevakuman dunia saat ini yang kering dari ekspresi dan sikap keagamaan. Liberalisasi beragama – istilah yang dipakai Cak Nur, semakin menenggelamkan pesona agama karena terkolonialisasi oleh proses rasionalisasi. Meskipun Weber menyatakan bahwa rasionalisasi merupakan perkembangan tak terelakkan dari sejarah utama, namun dia sendiri sebenarnya mencemaskan kecenderungan yang berakibat mendemistifikasi agama, dan menunjukkan relasi yang murni instrumental terhadap dunia natural dan masyarakat (Morris, 2005). Kecemasan Weber tampak terbukti, namun kecenderungan baru ini oleh Jurgen Habermas digambarkan sebagai gejala keterasingan dan ketidakpastian identitas kolektif sebagai akibat dari kolonialisasi dunia kehidupan (Habermas, 1988; 83). Sebagian krisis ini ditanggulangi oleh

beberapa pihak dengan cara mencari kembali pesona dunianya yang hilang (*disenchantment of the world*) melalui penguatan identitas (agama).

Mengelola Masyarakat Paska Sekuler

Oleh karena itu, perjalanan sejarah di abad ke-21 ini, agama semakin memperoleh tempat di ruang publik. Muncul berbagai komunitas keagamaan dalam ragam ekspresi dan sikap politik yang kian mengurangi keabsahan teori sekularisasi. Jurgen Habermas secara tepat menggambarkan situasi ini sebagai masyarakat paska sekuler. Menurut Habermas (2018), kemunculan ini setidaknya ditandai oleh tiga hal. Pertama, munculnya persepsi yang semakin meluas tentang konflik global yang selalu dikaitkan dengan pertikaian agama telah mengubah pemahaman publik. Sebagian besar publik di Eropa tidak memerlukan terma agama yang selalu dikaitkan dengan fundamentalisme dan terorisme, untuk membuat mereka menyadari relativitas pandangan mereka di tengah pandangan global. Sikap ini sedikit demi sedikit melemahkan keyakinan sekuler bahwa modernisasi sosial dan budaya hanya mungkin terjadi bersamaan dengan menyusutnya peran publik dan meningkatnya relevansi agama personal.

Kedua, pengaruh agama saat ini tidak saja diterima di seluruh dunia namun

juga di dalam ruang publik nasional. Ini didasarkan atas fakta semakin meningkatnya peran organisasi keagamaan yang diandaikan sebagai “komunitas tafsir” (*communities of interpretation*) dalam arena publik. Komunitas ini bisa memberi pengaruh dalam pembentukan opini publik dan pembentuk kemauan dengan turut mendorong isu-isu penting – lepas apakah hal ini didasarkan oleh fakta obyektif atau berdasarkan keyakinan saja. Di Indonesia situasinya jauh lebih dalam lagi. Meskipun syariat Islam yang diperjuangkan melalui piagam Jakarta gagal, tidak berarti berbagai kebijakan nasional lolos dari tafsir keagamaan. Bahkan Soeharto menyadari dengan baik, betapa legitimasi ulama melalui fatwa dan pendapat fikihnya atas kebijakan pemerintah, melapangkan jalan bagi implementasi kebijakan ini hingga ke masyarakat bawah. Legitimasi keagamaan seperti ini juga meminimalisir perlawanan rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

Ketiga, Habermas (2018) menyadari bahwa pemicu atas perubahan kesadaran paradigma paska sekuler adalah kaum imigran yang menjadi buruh tamu, pengungsi (*refugees*), khususnya dari negara yang memiliki latar belakang budaya tradisional. Sejarah Eropa sejak abad 16, harus berjuang mengakui adanya perpecahan agama dalam masyarakat dan

budaya mereka. Di tengah kebangkitan gelombang imigrasi, ketidakcocokan yang mencolok mata diantara agama yang berbeda-beda itu, berhubungan dengan tantangan pluralisme pandangan hidup di dalam masyarakat imigran. Masyarakat Eropa yang telah mapan dengan paradigma sekuler dipaksa menerima fakta baru atas kedatangan kaum imigran. Dalam perkembangannya, budaya-budaya kaum imigran yang berbeda tak mudah dipenggal demi beradaptasi dengan masyarakat sekuler. Karena sekularisme itu sendiri menyimpan superioritas budaya Barat yang berpretensi memaksa budaya-budaya lain berintegrasi ke dalam apa yang disebut sebagai proyek “Westernisasi/Eropaisasi”. Proses peleburan atau integrasi ini nampaknya tidak membuat kaum imigran ter-Eropakan, bahkan tak membuat mereka diperlakukan setara. Mereka justru merasa asing di negeri orang, sementara sebagai kaum imigran, mereka sudah tak lagi menggunakan atribut, simbol dan praktik-praktik budaya dari negeri masa lalunya. Di Amerika, sebagian minoritas muslim berjuang membenahi kurikulum sekolah yang bias sekuler; tidak akurat dan penuh kecurigaan memandang Islam.

Dapatkah keragaman budaya, hadirnya pluralitas pandangan dunia dikelola tanpa menimbulkan konflik laten? Eropa yang sampai hari ini dikenal sebagai

kampium demokrasi liberal tak tuntas mendiskusikannya. Kasus pengadilan HAM di Eropa saat menentukan apakah wanita muslim dibolehkan berjilbab/mengenakan cadar tak menghasilkan putusan bulat. Pengadilan Eropa menyerahkan masalah ini ke masing-masing negara pihak. Prancis melarang penebaran cadar/jilbab, beberapa negara lain mengikutinya. Atas dasar liberalisme (kebebasan dan otonomi individu), penebaran cadar dianggap menyimbolkan penindasan perempuan, menebarkan sikap ekstrim dan illeberal. Sementara di pihak lain, aktivis HAM dan gerakan kiri menilai kegagalan atas tuntutan di pengadilan ini menunjukkan Eropa masih menebar bias dan stereotipe terhadap Islam, over generalisasi, dan tidak becus membedakan ketidaksetujuan atas perbedaan budaya dengan rasialisme.

Di Indonesia tentu situasinya berbeda. Penganut Islam bukan kelompok minoritas, melainkan mayoritas. Usai runtuhnya Orde Baru, negara sudah banyak mengakomodasi tuntutan kelompok Islam politik terkait isu syariat Islam melalui Peraturan-peraturan daerah (perda), undang-undang zakat, lebelisasi halal, undang-undang pesantren, dan seterusnya. Apa itu tidak cukup? Di sinilah sebetulnya persoalan utama yang dihadapi pengikut dan pencela multikulturalisme: Mereka kerap

mendikotomikan antara problem redistribusi (*redistribution*) dan pengakuan (*recognition*) (Fraser, 1998, 2003). Di Indonesia hingga hari ini, isu multikulturalisme masih diperdebatkan sebagai upaya memperjuangkan pengakuan, sementara isu redistribusi dikesampingkan. Ini berarti menyembunyikan fakta adanya ketimpangan ekonomi. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, seperti disampaikan Hafid Abbas, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Termasuk penguasaan lahan lima juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016>).

PENUTUP

Merebaknya politik identitas di berbagai belahan dunia; ketegangan di Eropa antara kelompok kanan vs imigran, rasialisme, islamofobia di Amerika menguatnya kelompok politik Islam garis keras seperti di Indonesia, menurut Zigmunt Bauman, tak lain adalah sebetulnya perasaan cemas yang tak dapat disembunyikan yang hadir di berbagai tempat. Kelompok imigran cemas bagaimana mendapatkan kehidupan yang layak secara ekonomi, kaum pribumi cemas karena semakin kalah bersaing

dengan pendatang, orang-orang yang memenuhi monas dalam rangka aksi 212 di Indonesia mencemaskan kondisi politik yang tak menentu, korupsi merajalela, kehidupan rakyat tak banyak berubah, begitu seterusnya. Kondisi yang disebut Bauman sebagai *liquid fear*, ketakutan yang mengalir di berbagai tempat yang juga dipicu karena ketidakpastian (*uncertainty*) kekuatan (*power*) kelembagaan ekonomi, politik, sosial untuk bertanggung jawab atas masa depan kita. Dunia di masa kini membutuhkan dua hal yang semestinya bisa dijalankan secara seimbang, keamanan dan kebebasan. Keamanan tanpa kebebasan dapat menghasilkan perbudakan, kebebasan tanpa keamanan dapat menjurus ke *chaos*.

Bagaimana mengatasi semua persoalan ini? Bauman mengingatkan tak ada jalan pintas bagi upaya penyelesaian. Dalam konteks meningkatnya ekspresi dan artikulasi agama di pentas politik, barangkali gagasan Habermas perlu dipikirkan kembali; membuka dialog komunikatif dalam kerangka demokrasi *deliberatif*. Dialog yang komunikatif perlu memastikan sikap reflektif dan evaluatif masing-masing pihak dalam rangka transformasi. Sikap politik lama yang penuh apriori, saling membenarkan diri sendiri (*ego sektoral*), terlalu

mementingkan legalitas-formal perlu ditinggalkan.

Dalam konteks seperti ini barangkali peran moderasi Islam perlu diperbarui kembali: Menciptakan ruang dialog dan mediasi berbagai kelompok yang saling berlawanan. Dan salah satu prasyarat terselenggaranya dialog adalah menciptakan posisi setara di antara mereka, tanpa membeda-bedakan. Tentu ini bukan persoalan mudah, dan tak semudah menyatakannya bukan??

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Sheikhzadegen & Michael Nollert, *Religion, The Public Sphere and Identity Politics: How Radical Muslim Organization defies the populist rights in Switzerland*. European Societies, 2017.
- Brian Morris, *Religion and Anthropology, Critical Introduction*, Cambridge university Press. 2005.
- Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya. 1983.
- Costas Douzinas and Conor Geraty (Ed), *The Meaning of Rights: The Philosophy and Social Theory of Human Rights*. United Kingdom: Cambridge University Press. 2014.
- Habermas, Jurgen, *Secularism's Crisis of Faith*, dalam Notes on Post Secular Faith. New Perspective Quarterly/ Volume 25, issue 4. (13/10/2018)
- Hans Dieter Evers (Penyunting), *Teori Masyarakat: Proses Peradaban*
- Dalam Sistem Dunia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1988.
- Hefner, Robert W, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1995.
- Isabel Awad, *Critical Multiculturalism and Deliberative Democracy*. Javnoste-The Public. Volume 18. 2011.
- Jens Kohrsen, "How Religion is The Public Sphere? S Critical Stance on The Debate about Public Religion and Post-Secularity". *Acta Sociologica*. 55(3) 273-288. 2012
- Khoo Boo Teik, Vedi Hadiz and Yoshihiro Nakanishi, *Between Dissent and Power*. Palgrave Macmillan, IDE-JETRO. 2014.
- Madjid, Nurcholish, *keharusan Pembaruan Islam dan Masalah Integrasi Bangsa*, dalam, *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*,
- Timothy A. Byrnes and Peter J. Katzenstein, *Religion In an Expanding Europe*. Cambridge University Press. 2006.
- Umut Parmaksiz, *Making Sense of The Post Secular*, *European Journal of Social theory*. Vol. 2(1) 98-116. 2018.
- Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism In Indonesia and the Middle East*. Cambridge university Press. 2016

Sumber Media Online

<https://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2016/07/zygmunt-bauman->

[world-crisis-humanity
160722085342260.html](http://world-crisis-humanity.com/160722085342260.html)

[http://bangka.tribunnews.com/2016/12/04/
mengharukan-inilah-kisah-pengalaman-
wartawati-non-muslim-saat-liput-aksi-
damai-212](http://bangka.tribunnews.com/2016/12/04/mengharukan-inilah-kisah-pengalaman-wartawati-non-muslim-saat-liput-aksi-damai-212)

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/2
0160915175459-20-158611/komnas-ham-
minta-negara-ambil-tanah-yang-dikuasai-
konglomerat](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160915175459-20-158611/komnas-ham-minta-negara-ambil-tanah-yang-dikuasai-konglomerat)

[https://theconversation.com/whats-the-
difference-between-lies-and-post-truth-in-
politics-a-philosopher-explains-130442](https://theconversation.com/whats-the-difference-between-lies-and-post-truth-in-politics-a-philosopher-explains-130442)

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/
2019/02/08/berapa-pengguna-media-
sosial-indonesia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia)

[http://kabarkota.com/kisah-mengharukan-
dosen-uin-sunan-kalijaga-yogya-tentang-
aksi-212/](http://kabarkota.com/kisah-mengharukan-dosen-uin-sunan-kalijaga-yogya-tentang-aksi-212/)

[https://katadata.co.id/berita/2018/09/20/reb
utan-ulan-demi-gaet-suara-muslim-di-
pilpres-2019](https://katadata.co.id/berita/2018/09/20/rebutan-ulan-demi-gaet-suara-muslim-di-pilpres-2019)

[https://www.theguardian.com/commentisfr
ee/2018/nov/08/nostalgia-europe-populist-
politicians](https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/08/nostalgia-europe-populist-politicians)

[https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.
au/identity-politics-mobilising-religious-
sentiment-in-democratic-indonesia/](https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/identity-politics-mobilising-religious-sentiment-in-democratic-indonesia/)

[https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2020/04/
24/trumps-immigration-ban-is-another-
page-in-the-long-story-of-xenophobia-in-
america/](https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2020/04/24/trumps-immigration-ban-is-another-page-in-the-long-story-of-xenophobia-in-america/)

[https://republika.co.id/berita/pbc4u2428/p
uspek-unair-jokowi-dan-prabowo-
representasi-pemimpin-islam](https://republika.co.id/berita/pbc4u2428/puspek-unair-jokowi-dan-prabowo-representasi-pemimpin-islam)

[https://www.stanfordlawreview.org/online/
white-nationalism-as-immigration-policy/](https://www.stanfordlawreview.org/online/white-nationalism-as-immigration-policy/)

[https://democracyjournal.org/magazine/43/
what-next-for-liberalism/](https://democracyjournal.org/magazine/43/what-next-for-liberalism/)

[https://theconversation.com/bukan-
sekadar-berita-palsu-media-sosial-dan-
kampanye-politik-yang-disetir-pasar-
81755](https://theconversation.com/bukan-sekadar-berita-palsu-media-sosial-dan-kampanye-politik-yang-disetir-pasar-81755)

[https://pluralism.org/catholic-and-jewish-
immigrants](https://pluralism.org/catholic-and-jewish-immigrants)